

BAB I

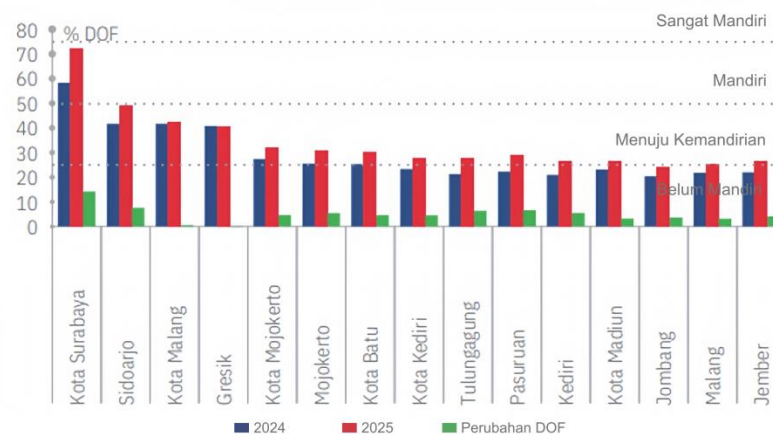
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan setiap wilayah memiliki wewenang, kewajiban, serta hak untuk mengurus sendiri daerahnya. Hal ini menempatkan pemerintah daerah pada posisi sentral dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. Pemerintah daerah mendapatkan keleluasaan untuk mengambil inisiatif dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya, sehingga diharapkan muncul kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lokal (Cholily, 2023).

Salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri (Handraini et al., 2024). PAD berperan sebagai indikator kemandirian fiskal yang mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kebutuhan, program, dan kegiatan pembangunan tanpa bergantung secara berlebihan pada transfer dari pemerintah pusat (Yudiasuti et al., 2025). Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin tinggi pula derajat kemandirian fiskalnya. Dalam praktiknya, salah satu sumber utama PAD berasal dari pajak daerah, yaitu penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayahnya (Astuti & Kartika, 2024).

Dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal tersebut, digunakan indikator Derajat Otonomi Fiskal (DOF), yaitu rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur November 2025, rata-rata DOF kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2025 tercatat sebesar 24,68 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa dari 38 kabupaten/kota, hanya sebagian daerah yang memiliki DOF di atas rata-rata provinsi, sementara mayoritas lainnya masih berada pada kategori menuju kemandirian dan belum mandiri. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih relatif tinggi di banyak daerah. Untuk melihat variasi tingkat kemandirian fiskal antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, sebaran nilai DOF tahun 2024-2025 divisualisasikan sebagai berikut:



Gambar 1.1 DOF Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2024-2025

Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur November, 2025

Berdasarkan gambar 1.1, terlihat bahwa daerah dengan tingkat DOF tertinggi antara lain Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Kota Malang. Sementara itu, 14 dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur berada pada rentang nilai yang relatif moderat. Kota Mojokerto termasuk dalam kelompok lima besar daerah

dengan DOF di atas rata-rata, dimana rata-rata provinsi tercatat sebesar 24,68 persen. Namun demikian, capaian DOF Kota Mojokerto tersebut masih berada pada kategori menuju kemandirian, sehingga upaya penguatan PAD tetap diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, optimalisasi sumber-sumber PAD, khususnya dari sektor pajak daerah, menjadi langkah strategis yang tidak hanya berfungsi meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memperkuat posisi fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Kota Mojokerto secara normatif memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang bersumber dari sektor perpajakan, salah satunya adalah PBB-P2. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun 2024, PBB-P2 menempati urutan ketiga sebagai penyumbang penerimaan pajak daerah di Kota Mojokerto. Mengingat besarnya potensi penerimaan dari sektor ini, optimalisasi PBB-P2 sangat diperlukan sebagai sumber pembiayaan berbagai kegiatan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan inovasi pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat (Hertati, 2023). Hal tersebut sebagai upaya memaksimalkan sumber-sumber pendapatan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya dalam pengelolaan PBB-P2.

Kota Mojokerto dikenal sebagai salah satu daerah yang aktif mengembangkan inovasi layanan publik, yang dibuktikan dengan keberhasilannya

meraih predikat kota terinovatif se-Indonesia dalam ajang Innovative Government Award 2025. Penghargaan tersebut menandai keberhasilan Kota Mojokerto mempertahankan capaian yang sama selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2022, sekaligus memperoleh Indeks Inovasi Daerah tertinggi di Regional II dengan total 245 inovasi daerah yang didaftarkan pada ajang tersebut. Untuk memberikan gambaran mengenai capaian inovasi Pemerintah Kota Mojokerto, dokumentasi penghargaan Kota Terinovatif pada ajang Innovative Government Award 2025 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1.2 Kota Mojokerto Meraih Penghargaan Kota Terinovatif
Sumber: inilahmojokerto.com, diakses pada 5 Maret 2026

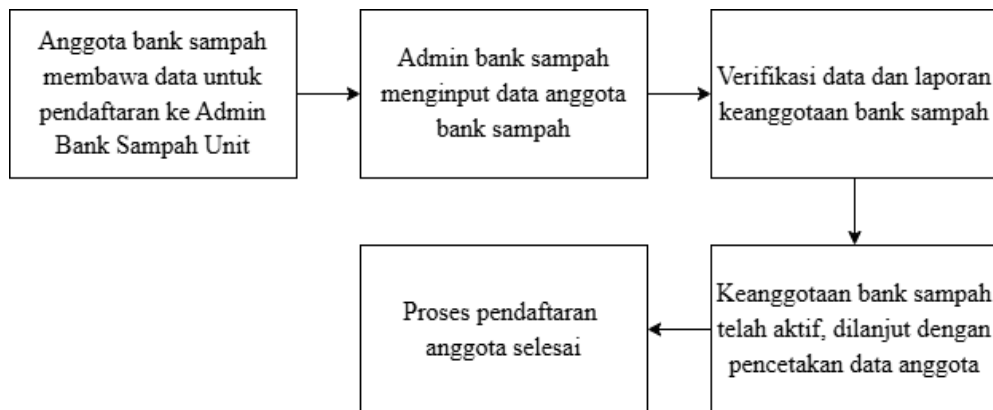
Salah satu inovasi yang mendapatkan perhatian dalam ajang penghargaan tersebut adalah program Bayar Pajak Pakai Sampah Bisa Langsung dan Terintegrasi (Bajak Sambal Terasi). Program Bajak Sambal Terasi merupakan inovasi yang mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan pembayaran PBB-P2. Adapun permasalahan yang melatarbelakangi dibentuknya Program Bajak Sambal Terasi adalah kondisi demografis Kota Mojokerto. Berdasarkan laman resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mojokerto memiliki jumlah penduduk sekitar 142.413 jiwa per 30 Juni 2025 dengan dominasi kelompok usia produktif.

Tingginya kepadatan penduduk tersebut berdampak pada meningkatnya volume timbunan sampah harian. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), rata-rata produksi sampah di Kota Mojokerto pada tahun 2024 mencapai sekitar 99,2 ton per hari yang sebagian besar berasal dari aktivitas rumah tangga. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota Mojokerto untuk menghadirkan inovasi yang tidak hanya berfokus pada penanganan permasalahan sampah, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta mendorong partisipasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah. Oleh karena itu, pada tahun 2022 Pemerintah Kota Mojokerto meluncurkan program Bajak Sambal Terasi sebagai inovasi yang mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan pembayaran PBB-P2.

Bajak Sambal Terasi merupakan program inovatif yang dirancang untuk mengatasi permasalahan lingkungan sekaligus mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan daerah, khususnya PBB-P2, melalui penukaran sampah anorganik menjadi saldo tabungan untuk pembayaran pajak. Program ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sampah berbasis Bank Sampah, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor PBB-P2, melalui kemudahan pembayaran menggunakan hasil pengelolaan sampah (Sumber: https://tuxedovation.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/detail_inovasi/148433, diakses pada 5 Maret 2026).

Program Bajak Sambal Terasi melibatkan kolaborasi antara Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dan Bank Sampah Kota Mojokerto. Berikut ini alur pelaksanaan programnya:

Tahap 1

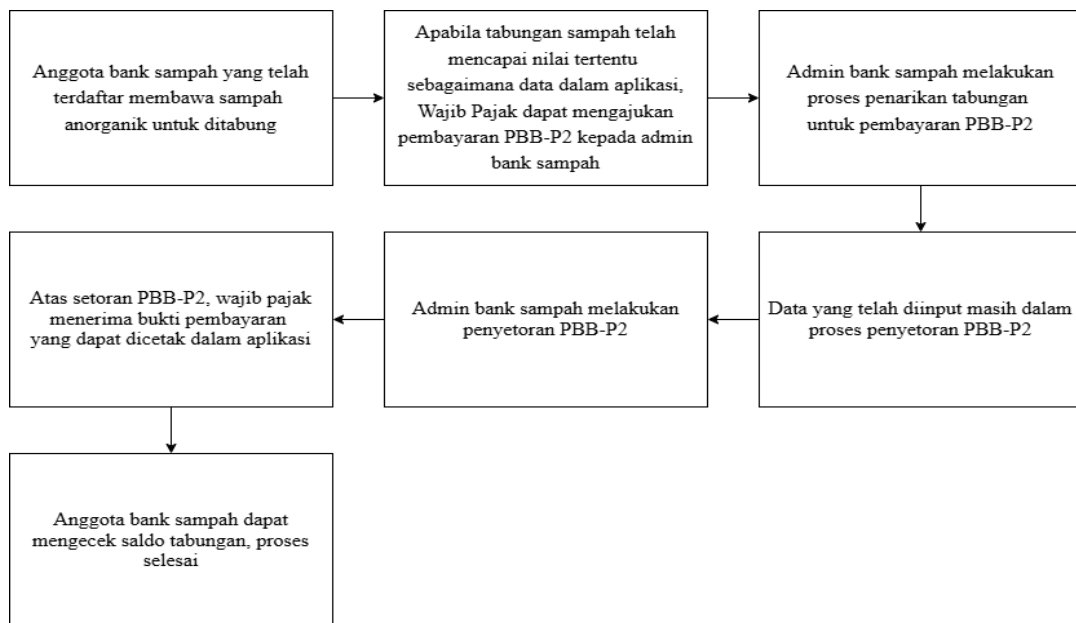


Gambar 1.3 Alur Pendaftaran Anggota Baru

Sumber: SOP Program Bajak Sambal Terasi, 2026

Gambar 1.3 menunjukkan tahap pertama pelaksanaan Program Bajak Sambal Terasi yang berisi alur pendaftaran anggota bank sampah. Proses diawali dengan penyerahan data oleh calon anggota kepada admin bank sampah, dilanjutkan dengan penginputan dan verifikasi data. Setelah keanggotaan dinyatakan aktif, data anggota dicetak sebagai bukti pendaftaran sehingga proses registrasi anggota bank sampah selesai. Selanjutnya, tahap kedua yang berisi alur pembayaran PBB-P2 disajikan pada gambar berikut:

Tahap 2

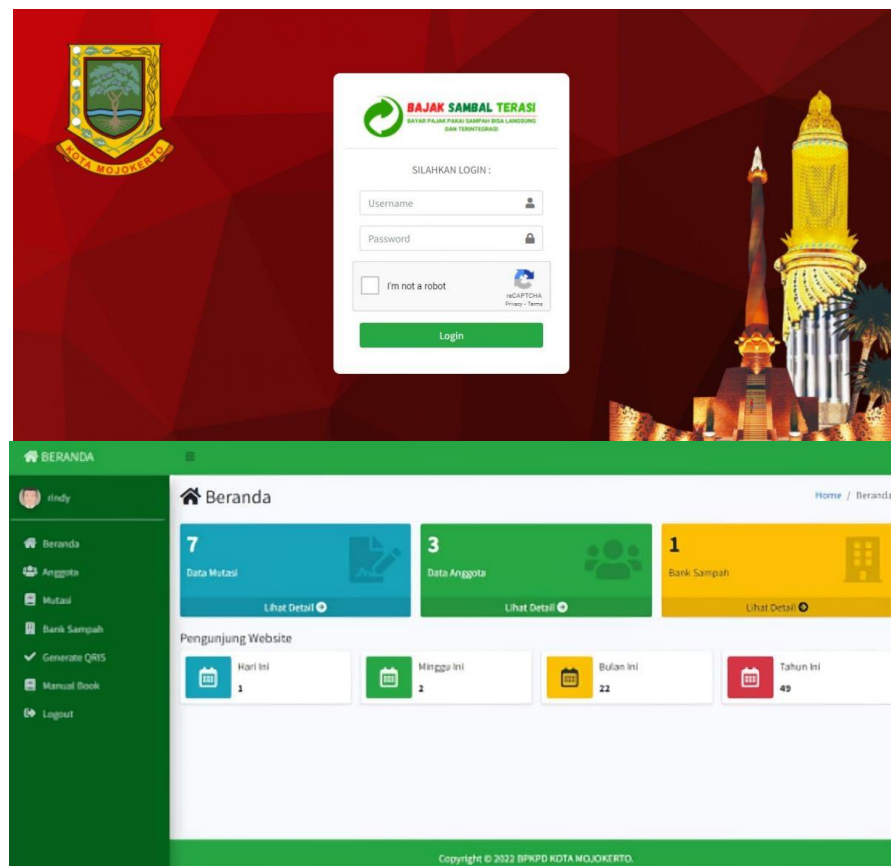


Gambar 1.4 Alur Pembayaran PBB-P2

Sumber: SOP Program Bajak Sambal Terasi, 2026

Alur pembayaran PBB-P2 pada Program Bajak Sambal Terasi dimulai dari penabungan sampah oleh anggota bank sampah hingga nilai tabungan memenuhi nominal pembayaran PBB-P2. Selanjutnya, admin bank sampah melakukan penarikan tabungan dan menyetorkan pembayaran PBB-P2. Setelah pembayaran berhasil diproses, wajib pajak memperoleh bukti pembayaran yang dapat dicetak melalui aplikasi, sedangkan saldo tabungan dapat diakses kembali oleh anggota sebagai tahap akhir dari proses pembayaran.

Untuk mendukung pelaksanaan alur tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto mengembangkan aplikasi berbasis web bernama Bajak Sambal Terasi. Tampilan aplikasi Bajak Sambal Terasi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.5 Tampilan Aplikasi Bajak Sambal Terasi

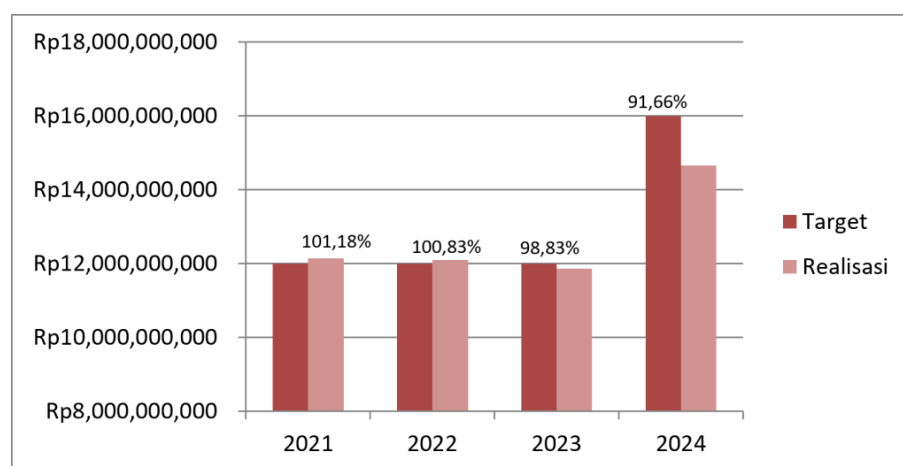
Sumber: *Manual Book Bajak Sambal Terasi*, 2026

Aplikasi Bajak Sambal Terasi dapat diakses pada laman: <https://banksampah.mojokertokota.go.id/login>. Aplikasi ini menyediakan beberapa fitur seperti data anggota, data mutasi, data bank sampah, data pengunjung website, manual book, dan *generate QRIS*. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan transaksi menabung, membayar PBB, dan tarik tunai yang dapat diakses oleh admin Bank Sampah Unit (BSU) dan anggota Bank Sampah yang terdaftar dalam program.

Bapak Rachmat Surya selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKPD Kota Mojokerto menyampaikan sebagai berikut:

“Terus disitu selain untuk pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan, salah satu tujuannya adalah untuk membantu masyarakat dalam sisi ekonomi untuk meringankan beban mereka, karena membayar pajaknya itu menggunakan sampah, tidak langsung uang cash. Jadi seperti itu. Jadi selain untuk lingkungan juga membantu meringankan beban masyarakat. Di satu sisi, itu untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor PBB, walaupun dari penerimaan dari program ini belum optimal.” (Hasil wawancara pendahuluan tanggal 17 Oktober 2025)

Program Bajak Sambal Terasi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan meringankan beban pembayaran pajak melalui mekanisme penukaran sampah. Selain itu, program ini juga menjadi upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD, khususnya dari sektor PBB-P2. Namun demikian, kontribusi penerimaan pajak dari program tersebut masih belum optimal dan belum mampu memenuhi harapan dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2. Kondisi tersebut dapat dicermati melalui perkembangan target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Mojokerto selama empat tahun terakhir yang disajikan pada gambar berikut:

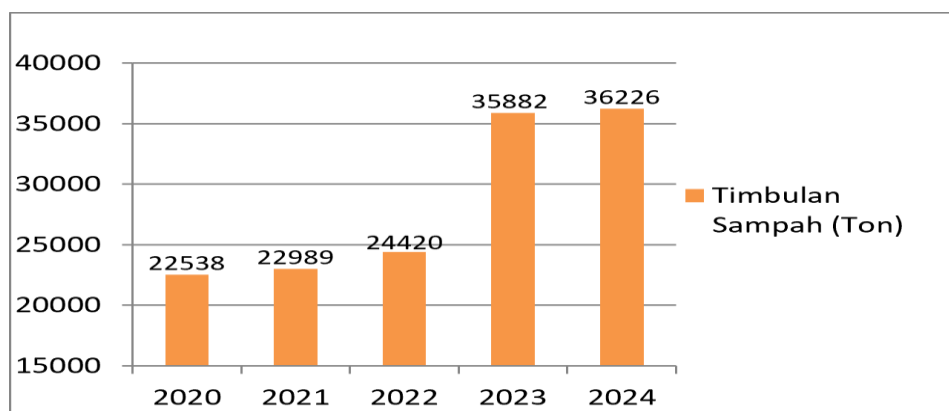


Gambar 1.6 Target dan Realisasi PBB-P2 di Kota Mojokerto Tahun 2021-2024

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto yang diolah peneliti, 2025

Berdasarkan gambar 1.6, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Mojokerto selama periode 2021–2024 menunjukkan adanya tren penurunan dalam persentase pencapaian target penerimaan. Pada tahun 2021 dan 2022, realisasi masih mencapai target dengan persentase masing-masing 101,18% dan 100,83%. Namun, pada tahun 2023 realisasi tidak lagi memenuhi target dengan capaian 98,83%, dan kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2024 dengan penurunan signifikan menjadi 91,66%, meskipun secara nominal penerimaan meningkat menjadi Rp14,66 miliar.

Selain ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2, Program Bajak Sambal Terasi juga dikembangkan sebagai upaya pengurangan timbulan sampah melalui pemanfaatan sampah anorganik sebagai media pembayaran pajak. Oleh karena itu, pelaksanaan program juga perlu dilihat dari kondisi timbulan sampah yang menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung keberlangsungannya. Adapun perkembangan volume timbulan sampah di Kota Mojokerto selama periode 2020–2024 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1.7 Data Timbulan Sampah Kota Mojokerto Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, 2025

Gambar 1.7 menunjukkan volume timbunan sampah setiap tahunnya terus mengalami peningkatan meskipun program Bajak Sambal Terasi telah diluncurkan sejak tahun 2022. Bahkan pada tahun 2023, volume timbunan sampah meningkat drastis sebanyak 11.462 ton dari tahun sebelumnya. Meningkatnya volume timbunan sampah tersebut tidak secara otomatis diikuti oleh meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Program Bajak Sambal Terasi. Secara konseptual, tingginya timbunan sampah seharusnya menjadi potensi bagi optimalisasi program, karena sampah yang terkumpul dapat dimanfaatkan sebagai alat pembayaran PBB-P2. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan timbunan sampah belum mampu mendorong partisipasi masyarakat secara signifikan dalam program tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan implementasi antara tujuan ekologis dan tujuan fiskal program. Di satu sisi, program dirancang untuk mengurangi volume timbunan sampah melalui mekanisme bank sampah, sementara di sisi lain program juga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui skema pembayaran PBB-P2 berbasis sampah. Namun tingginya timbunan sampah tidak otomatis berbanding lurus dengan efektivitas pelaksanaan program, sehingga menunjukkan bahwa potensi ekologis yang ada belum sepenuhnya terkonversi menjadi manfaat fiskal.

Dalam pelaksanaannya, BPKPD bekerja sama dengan Bank Sampah Induk Kota Mojokerto yang selanjutnya mengoordinasikan pelaksanaan program kepada Bank Sampah Unit (BSU) yang ada di bawah naungannya. Saat ini terdapat 155 BSU yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Mojokerto. Namun tidak seluruh BSU yang beroperasi terdaftar dalam program Bajak Sambal Terasi. Dari total tersebut,

hanya 89 BSU yang berpartisipasi dalam program. Permasalahan lain yang terjadi adalah dari total 89 BSU yang berpartisipasi, hanya 23 BSU yang tercatat memiliki nasabah aktif atau menunjukkan riwayat transaksi pada aplikasi Bajak Sambal Terasi.

Bapak Rachmat Surya selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKPD Kota Mojokerto menyampaikan sebagai berikut:

“Program ini terus berjalan cuman masih stagnan. Dalam arti antusiasmenya masih stabil. Karena kembali ke bank sampahnya lagi, apakah mereka mau mendaftarkan atau tidak (untuk yang baru). Kalau untuk yang lama mereka mau menggunakan aplikasinya atau tidak... . Yang penting bank sampahnya mau berpartisipasi, akan kita daftarkan untuk kita kasih akses, user, dan pass sebagai admin bank sampah di RT RW.” (Hasil wawancara pendahuluan tanggal 17 Oktober 2025)

Pelaksanaan program masih berada pada kondisi yang relatif stabil dan belum menunjukkan peningkatan partisipasi yang signifikan. Pelaksanaan program di tingkat lapangan bergantung pada kesiapan BSU untuk berpartisipasi, mengingat tidak seluruh BSU terlibat dalam program. Salah satu penyebab minimnya BSU yang terlibat dalam program tersebut adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelola Bajak Sambal Terasi (Arrasya, 2025). Berikut ini data 23 BSU yang berpartisipasi dalam program tersebut:

Tabel 1.1 Data Bank Sampah Unit, Jumlah Nasabah Aktif, dan Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 Tiap Kecamatan

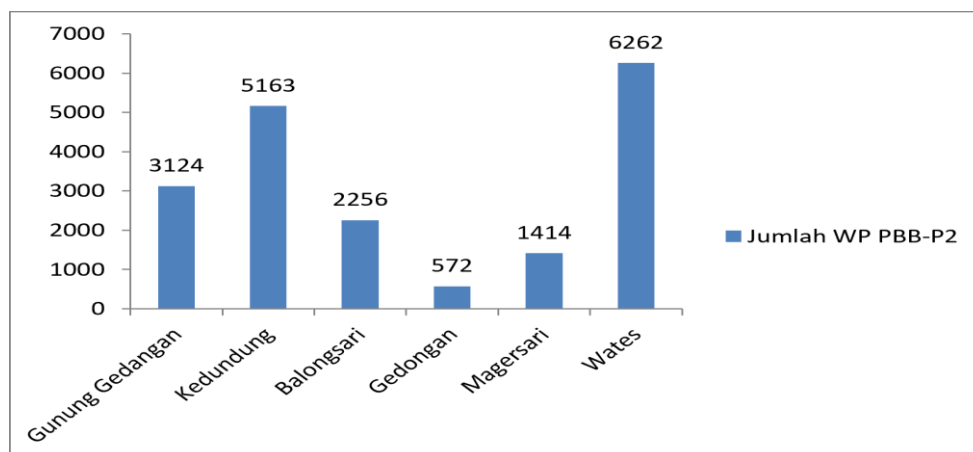
No.	Nama Bank Sampah	Jumlah Nasabah Aktif (KK)	Jumlah WP PBB-P2
1.	Kecamatan Prajurit Kulon		15.179
	Bank Sampah Tiga Puluh	76	
	Bank Sampah Istiqomah	24	
	Bank Sampah Tanggul Rejo Resik	4	
	Bank Sampah Asri	21	
	Bank Sampah Makmur Sejahtera	22	
	Bank Sampah Sumubar	11	
	Bank Sampah Ansor	1	
	Bank Sampah Prima	5	
	Bank Sampah Fitrah	5	
	Bank Sampah Matahari	1	
	TOTAL	170	15.179
2.	Kecamatan Magersari		18.791
	Bank Sampah Mawar Wates 3	37	
	Bank Sampah Gaposi Sejahtera	5	
	Bank Sampah Damai Sejahtera	3	
	Bank Sampah Argo Berseri	13	
	Bank Sampah Edelweiss	1	
	Bank Sampah Merbabu Alam Sejahtera	14	
	Bank Sampah Gading	11	
	Bank Sampah Lumbung Permata	1	
	TOTAL	85	18.791
3.	Kecamatan Kranggan		12.413
	Bank Sampah Migunani	1	
	Bank Sampah Anggrek 2	3	
	Bank Sampah Artha Warga	1	
	Bank Sampah Baru Semi	9	
	Bank Sampah Nusa Indah	12	
	TOTAL	26	12.413

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto yang diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 1.1, Kecamatan Prajurit Kulon memiliki tingkat partisipasi tertinggi dengan 10 BSU aktif dan 170 nasabah, meskipun jumlah tersebut masih kurang dari 2% dari total 15.179 Wajib Pajak. Kecamatan Magersari memiliki 8 BSU aktif dengan 85 nasabah, yang menunjukkan partisipasi relatif

rendah dibandingkan dengan potensi 18.791 Wajib Pajak. Sementara itu, Kecamatan Kranggan mencatat tingkat partisipasi terendah dengan 5 BSU aktif dan 26 nasabah, jauh di bawah potensi 12.413 Wajib Pajak, yang mencerminkan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam program Bank Sampah.

Berdasarkan data tersebut, kesenjangan implementasi program yang paling signifikan terjadi di Kecamatan Magersari. Meskipun memiliki basis Wajib Pajak (WP) terbesar, yaitu mencapai 18.791 objek pajak, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan inovasi Bajak Sambal Terasi justru tergolong sangat rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya jumlah nasabah aktif, yaitu hanya 85 orang yang terdaftar melalui delapan Bank Sampah Unit (BSU). Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan apabila dibandingkan dengan Kecamatan Prajurit Kulon yang memiliki wajib pajak lebih sedikit, yaitu 15.179 WP. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat adopsi program di Kecamatan Prajurit Kulon lebih baik dengan total 170 nasabah aktif yang dilayani oleh 10 unit BSU yang beroperasi. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa besarnya potensi fiskal yang dimiliki Kecamatan Magersari belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam inovasi pembayaran pajak menggunakan sampah. Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai potensi fiskal di wilayah tersebut, perlu ditinjau distribusi jumlah Wajib Pajak PBB-P2 pada masing-masing kelurahan di Kecamatan Magersari. Data jumlah Wajib Pajak PBB-P2 per kelurahan di Kecamatan Magersari tahun 2025 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1.8 Jumlah WP PBB-P2 per Kelurahan di Kecamatan Magersari Tahun 2025

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto yang diolah peneliti, 2025

Kecamatan Magersari terdiri dari enam kelurahan, yaitu Kelurahan Gedongan, Kelurahan Magersari, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Kedundung, dan Kelurahan Wates. Berdasarkan gambar 1.8, Kelurahan Wates memiliki jumlah WP PBB-P2 terbanyak, yaitu 6.262 objek pajak pada tahun 2025. Kondisi tersebut menjadikan Kelurahan Wates sebagai daerah dengan basis pajak paling besar di Kecamatan Magersari. Kelurahan Wates juga menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Mojokerto, dimana berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, jumlah penduduk Kelurahan Wates sebanyak 20.353 pada Semester I Tahun 2025. Hal ini tentunya berkorelasi dengan volume timbulan sampah yang dihasilkan. Semakin tinggi jumlah penduduk di suatu wilayah maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan akibat meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat (Alves et al., 2025).

Sebagai salah satu wilayah dengan potensi fiskal dan ekologis yang cukup besar, Kelurahan Wates didukung oleh keberadaan sejumlah bank sampah yang

tersebar di berbagai lingkungan masyarakat. Namun, tidak seluruh bank sampah tersebut terlibat dalam pelaksanaan Program Bajak Sambal Terasi. Adapun daftar bank sampah di Kelurahan Wates beserta tingkat partisipasinya dalam Program Bajak Sambal Terasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Daftar Bank Sampah di Kelurahan Wates yang berpartisipasi dalam Program Bajak Sambal Terasi

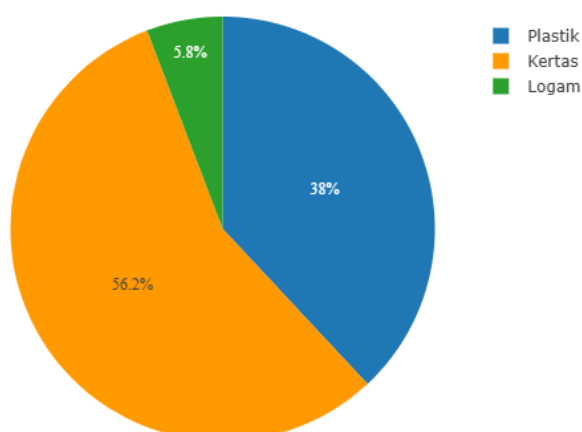
Nama Bank Sampah	Keterangan dalam Program Bajak Sambal Terasi	Jumlah Nasabah Aktif
BS. Arjuno	Tidak berpartisipasi	-
BS. B-Tri "B3"	Tidak berpartisipasi	-
BS. Mawar Wates 3	Berpartisipasi dan memiliki nasabah aktif	37
BS. Arto Moro Dewe	Tidak berpartisipasi	-
BS. Ertiga	Tidak berpartisipasi	-
BS. Sapu Lidi	Tidak berpartisipasi	-
BS. Sahabat Lingkungan	Tidak berpartisipasi	-
BS. Rapi (Raung Merapi)	Tidak berpartisipasi	-
BS. Barokah	Berpartisipasi	-
BS. Kawi Sejahtera	Berpartisipasi	-
BS. Lumbung Permata	Berpartisipasi dan memiliki nasabah aktif	1
BS. Pundi Permata	Tidak berpartisipasi	-
BS. Rajawali	Tidak berpartisipasi	-
BS. Usman 007	Tidak berpartisipasi	-
BS. Jasmine	Tidak berpartisipasi	-
BS. Argo Berseri	Berpartisipasi dan memiliki nasabah aktif	13
BS. Iman	Tidak berpartisipasi	-
BS. SMPN 9	Tidak berpartisipasi	-
BS. Resik Battok	Berpartisipasi	-
BS. Kartar Kawi	Tidak berpartisipasi	-

Sumber: BPKPD dan BSI Kota Mojokerto yang diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 1.2, Kelurahan Wates memiliki total 20 BSU yang tersebar di beberapa wilayah. Dari jumlah tersebut, 3 BSU tercatat berpartisipasi aktif dan memiliki nasabah, 3 BSU terdaftar sebagai partisipan program namun belum memiliki nasabah aktif, sementara 14 BSU lainnya tidak berpartisipasi dalam

program Bajak Sambal Terasi. Selain itu, jumlah nasabah aktif atau warga yang berpartisipasi dalam program tersebut hanya mencapai 51 orang. Padahal berdasarkan gambar 1.6, jumlah WP PBB-P2 di Kelurahan Wates pada tahun 2025 tercatat sebanyak 6.262 orang. Mengingat sasaran utama program Bajak Sambal Terasi adalah para WP PBB-P2, hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak melalui program tersebut masih rendah, yakni kurang dari 1%. Kondisi ini belum sebanding dengan potensi timbulan sampah yang dihasilkan Kelurahan Wates, mengingat wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk sekaligus WP PBB-P2 terbesar di Kota Mojokerto sehingga berpotensi menghasilkan volume sampah yang relatif tinggi.

Besarnya potensi timbulan sampah di Kelurahan Wates dapat diidentifikasi melalui komposisi jenis sampah yang diterima oleh Bank Sampah Unit (BSU), karena jenis sampah tersebut merepresentasikan sampah anorganik yang berhasil dipilah dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Adapun jenis sampah yang paling banyak masuk ke BSU selama tahun 2024 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1.9 Daftar Sampah Yang Paling Banyak Masuk ke BSU Tahun 2024
 Sumber: Data BSU di Kelurahan Wates yang diolah peneliti, 2025

Berdasarkan gambar 1.9, jenis sampah yang paling banyak masuk ke BSU pada tahun 2024 didominasi oleh sampah kertas dengan persentase sebesar 56,2% dari total sampah yang diterima. Jumlah ini menunjukkan bahwa sampah kertas menjadi jenis sampah yang paling sering disetorkan oleh masyarakat ke BSU. Selanjutnya, sampah plastik menempati posisi kedua dengan persentase 38%, yang juga menunjukkan kontribusi cukup besar dalam komposisi sampah yang dikelola. Sementara itu, sampah logam merupakan jenis sampah dengan jumlah paling sedikit, yaitu hanya sebesar 5,8% dari total keseluruhan sampah yang masuk. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampah yang dikelola oleh BSU pada tahun 2024 berasal dari bahan yang relatif mudah dikumpulkan dan memiliki nilai ekonomi, terutama kertas dan plastik.

Ibu Nursanti selaku Admin Aplikasi Bajak Sambal Terasi di BSU Argo Berseri Kelurahan Wates menyampaikan sebagai berikut:

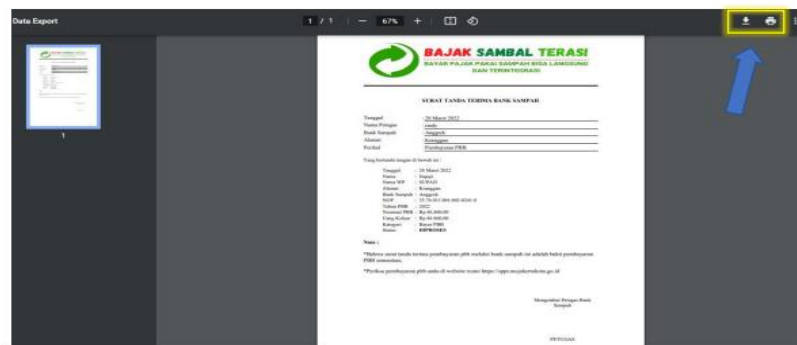
“...tapi dari 42 anggota BSU Argo Berseri itu ngga semuanya ikut program Bajak Sambal Terasi. Yang masuk ke program hanya sekitar 13 an orang. Soalnya kadang orang itu berpikinya gini, wong sampah lo berapa seh, kalau buat mbayar pajak juga nambah sama aja. Karena kebanyakan warga itu takut kalau dimintain nomor pajak (NOP), takut jika disalahgunakan.”
(Hasil wawancara pendahuluan tanggal 22 Oktober 2025)

Kutipan wawancara pendahuluan tersebut menunjukkan gambaran awal implementasi Program Bajak Sambal Terasi di salah satu Bank Sampah Unit (BSU) di Kelurahan Wates. Dari total 42 anggota BSU Argo Berseri, hanya sekitar 13 orang yang tercatat berpartisipasi dalam program. Kondisi ini menunjukkan bahwa program belum sepenuhnya mampu menjangkau dan melibatkan seluruh anggota bank sampah secara optimal. Informan juga menyebutkan beberapa faktor yang mungkin memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat. Sebagian anggota BSU

menganggap bahwa program ini tidak terlalu membantu dalam pembayaran pajak, karena nilai sampah yang terkumpul dinilai relatif kecil dibandingkan dengan besaran kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Selain itu, terdapat kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait penggunaan data Nomor Objek Pajak (NOP) dalam pelaksanaan program. Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan potensi penyalahgunaan data, yang berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksana program.

Selain itu, hasil wawancara pendahuluan juga mengindikasikan adanya permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi Bajak Sambal Terasi. Permasalahan tersebut terutama berkaitan dengan mekanisme pencatatan pembayaran PBB-P2 yang dilakukan melalui bank sampah. Adapun tampilan status pembayaran PBB-P2 pada aplikasi Bajak Sambal Terasi disajikan pada gambar berikut:

Surat ini sebagai **bukti pembayaran sementara** bahwa telah melakukan **pembayaran PBB** melalui bank sampah.



***NOTE**

1. Pembayaran PBB oleh nasabah di anggap **SAH**, jika petugas bank sampah telah **menyetorkan** ke tempat pembayaran yang resmi (**Kantor BPKPD**).
2. Jika Petugas bank sampah **BELUM** menyetorkan maka Status pembayaran PBB di aplikasi BAJAK SAMBAL TERASI di anggap **BELUM LUNAS** dengan Status (**DIPROSES**).

Gambar 1.10 Status Pembayaran PBB-P2 pada Aplikasi Bajak Sambal Terasi

Sumber: *Manual Book Bajak Sambal Terasi*, 2026

Beberapa masyarakat mengeluhkan terkait integrasi sistem pada aplikasi Bajak Sambal Terasi. Meskipun anggota bank sampah dapat melakukan pembayaran tagihan PBB-P2 melalui aplikasi, status pembayarannya belum secara otomatis tercatat sebagai lunas. Pembayaran PBB-P2 oleh nasabah baru dianggap sah setelah petugas bank sampah melakukan penyetoran ke tempat pembayaran yang resmi yaitu Kantor BPKPD. Jika petugas bank sampah belum melakukan penyetoran, maka status pembayaran PBB-P2 di aplikasi Bajak Sambal Terasi masih tercantum sebagai “diproses” dan belum dianggap lunas. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun program sudah didukung oleh aplikasi digital yang memfasilitasi pembayaran PBB-P2 melalui bank sampah, aplikasi tersebut masih berperan sebagai sarana pendukung pencatatan transaksi. Sementara itu penetapan status pelunasan pajak masih memerlukan tahapan lanjutan berupa penyetoran ke BPKPD.

Terkait sosialisasi program, Bapak Rachmat Surya selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKPD Kota Mojokerto menyampaikan sebagai berikut:

“Sudah, baik melalui media sosial maupun langsung. Kita pernah sosialisasi langsung ke anggota bank sampah. Tapi ga secara rutin. Terakhir akhir tahun 2023. Jadi sosialisasinya ditujukan kepada anggota bank sampah dan masyarakat umum (melalui media sosial).” (Hasil wawancara pendahuluan tanggal 17 Oktober 2025)

Sosialisasi program telah dilakukan oleh BPKPD Kota Mojokerto baik melalui media sosial maupun secara langsung kepada anggota bank sampah. Namun berdasarkan informasi awal di lapangan, kegiatan sosialisasi tersebut belum dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan, dengan pelaksanaan secara *offline*

terakhir tercatat pada akhir tahun 2023. Sosialisasi lebih banyak ditujukan kepada anggota bank sampah, sementara masyarakat umum mendapatkan informasi melalui media sosial.

Berbagai kondisi tersebut menunjukkan bahwa program Bajak Sambal Terasi masih menghadapi sejumlah permasalahan yang kompleks dalam pelaksanaannya. Program ini pada dasarnya dirancang untuk memberikan kemudahan membayar pajak kepada masyarakat. Namun rendahnya tingkat partisipasi publik menjadi permasalahan utama dalam implementasi program. Di Kelurahan Wates, tingkat partisipasi BSU dan masyarakat masih tergolong rendah. Proses sosialisasi belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata serta integrasi sistem masih bersifat parsial. Berbagai kendala tersebut berdampak pada belum optimalnya capaian tujuan program.

Penelitian tentang Program Bajak Sambal Terasi juga dilakukan oleh Arrasya (2025) dengan judul “Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Menggunakan Bajak Sambal Terasi di Kota Mojokerto”. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa kontribusi penerimaan pajak melalui inovasi Bajak Sambal Terasi terbukti belum mampu menembus angka 50% dari total keseluruhan penerimaan PBB-P2. Rendahnya angka kontribusi tersebut menandakan bahwa program inovasi yang diharapkan menjadi pendorong partisipasi masyarakat belum berjalan optimal. Penelitian lain yang membahas tentang inovasi pembayaran pajak menggunakan sampah adalah penelitian oleh Pradana (2021) yang berjudul “Analisis Penerapan Inovasi Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Menggunakan Sampah Guna Mensejahterakan Masyarakat Kota

Batu”. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa Kota Batu menghadapi kendala rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB tepat waktu, serta tingginya jumlah wajib pajak yang belum membayar. Kota Batu memproduksi sampah dalam jumlah melimpah (sekitar 80 ton per hari), sehingga inovasi pembayaran PBB menggunakan sampah melalui bank sampah menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus mengelola sampah secara produktif. Namun, penerapan inovasi ini menghadapi tantangan seperti keberagaman tarif pajak, teknologi yang belum optimal, dan gangguan eksternal seperti pandemi Covid-19.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, meskipun kedua penelitian telah memberikan gambaran mengenai manfaat dan kendala inovasi pembayaran pajak menggunakan sampah, kajian yang ada masih berfokus pada capaian penerimaan pajak dan bersifat makro. Penelitian terdahulu belum mengevaluasi secara mendalam proses implementasi program di tingkat kelurahan, termasuk bagaimana peran aktor pelaksana, mekanisme koordinasi, sosialisasi, serta respons masyarakat terhadap pelaksanaan program. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan evaluasi implementasi program di tingkat kelurahan dengan menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai konteks kebijakan, kesiapan sumber daya, proses implementasi, serta hasil yang dicapai oleh Program Bajak Sambal Terasi di Kelurahan Wates Kota Mojokerto.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul penelitian **“Evaluasi**

Program Bajak Sambal Terasi (Bayar Pajak Pakai Sampah Bisa Langsung dan Terintegrasi) di Kelurahan Wates Kota Mojokerto”.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini merumuskan masalah berdasarkan kondisi yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian. Adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah bagaimana Evaluasi Program Bajak Sambal Terasi (Bayar Pajak Pakai Sampah Bisa Langsung dan Terintegrasi) di Kelurahan Wates Kota Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai Evaluasi Program Bajak Sambal Terasi (Bayar Pajak Pakai Sampah Bisa Langsung dan Terintegrasi) di Kelurahan Wates Kota Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Umum

Secara akademis merupakan persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata 1 pada Program Studi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan jumlah sumber atau informasi yang berguna untuk penelitian yang relevan atau memiliki kesamaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Manfaat untuk Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan tambahan mengenai evaluasi program pengelolaan sampah berbasis

insentif fiskal. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan atau referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian serupa di masa mendatang.

- 2) Manfaat untuk BPKPD dan Bank Sampah Unit di Kota Mojokerto, penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas pelaksanaan program Bajak Sambal Terasi. Temuan penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi serta pertimbangan dalam merumuskan strategi perbaikan dan pengembangan kebijakan agar program dapat berjalan lebih optimal.
- 3) Manfaat untuk peneliti, penelitian ini memberikan pengalaman secara langsung dalam proses penelitian lapangan serta menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai evaluasi kebijakan publik dan implementasi program lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.